

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan perusahaan di Indonesia. Pada era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, menuntut perusahaan untuk menghadapi dan mengantisipasi segala situasi agar mampu bertahan dan tetap maju di tengah situasi tersebut, khususnya dalam rangka pencapaian tujuan utama perusahaan tersebut (Chandra, 2010). Dengan adanya persaingan yang semakin tinggi diharapkan perusahaan mampu berjalan seimbang. Faktor penyeimbang tersebut dituntut untuk mempunyai tata kelola perusahaan yang baik yang disebut *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan (*stakeholders*). Hal ini sangat perlu diperhatikan guna menjamin kesehatan dari perusahaan yang sedang berjalan. Bagaimanapun suatu perusahaan dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap prinsip GCG diperhatikan.

Proses pengendalian diharapkan akan menyelamatkan suatu perusahaan dari perselisihan yang timbul antar pemimpin perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan perundang-undangan sistem pengendalian ditetapkan dalam peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Pengembangan Penguatan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada kementerian BUMN dan BUMN dengan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan

Adiperdana. hal ini sebagai wujud komitmen BUMN dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. (sumber SINDOnews Selasa, 5 Desember 2017 - 14:24 WIB Jakarta)

Pencapaian target secara maksimal diharapkan dari persaingan akan memberikan dampak terhadap penggerak perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hubungan nilai tukar mata uang

Nurjannah (2018), Kebangkrutan merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu dalam melunasi kewajibannya. Weston dan Copeland dalam penelitian oleh Tambunan (2015:3) mengemukakan kebangkrutan merupakan suatu kegagalan yang terjadi pada perusahaan dalam berbagai pengertian sebagai berikut: 1. Kegagalan Ekonomi (*Economic Distressed*), bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu dalam menutupi biayanya, yang artinya bahwa laba yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan biaya modalnya. 2. Kegagalan Keuangan (*Financial Distressed*), insolvensi memiliki dua bentuk yakni default teknis yang terjadi jika perusahaan gagal memenuhi salah satu kondisi didalam ketentuan hutangnya, seperti rasio aktiva lancar dengan hutang lancar ditetapkan, serta technical insolvensi kegagalan keuangan atau ketidakmampuan teknik yang terjadi jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

Penyebab kebangkrutan yakni oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, baik yang bersifat khusus berkaitan langsung maupun yang bersifat umum. 1. Faktor Internal disebabkan oleh: a) Manajemen yang tidak baik dan tidak efisien. Manajemen yang tidak efisien dapat disebabkan oleh kurangnya dalam hal

kemampuan, pengalaman dan ketrampilan manajemen tersebut. b) Jumlah antara modal dengan hutang perusahaan yang tidak seimbang. Hutang yang terlalu besar mengakibatkan beban bunga yang besar pula. Namun piutang yang terlalu besar pun dapat merugikan perusahaan, karena modal kerja yang tertanam akan mengakibatkan berkurangnya likuiditas perusahaan. c) Sumber daya secara keseluruhan tidak memadai ketrampilan, integritas, loyalitas bahkan moralitas yang rendah dapat menyebabkan banyaknya kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan terhadap keuangan perusahaan serta penyalahgunaan wewenang yang akibatnya akan merugikan perusahaan. 2. Faktor eksternal yang bersifat umum adalah faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta tingkat campur tangan pemerintah dimana perusahaan tersebut berada. Disamping itu, penggunaan teknologi yang keliru juga dapat mengakibatkan biaya implementasi dan biaya pemeliharaan perusahaan menjadi besar sehingga dapat menyebabkan bangkrut.

Indra Bastian,(Lingkup Akuntansi Sektor Publik) Peranan organisasi sektor publik, seperti pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari 50 tahun. Apabila terdapat pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan, itu akan berdampak pada kekosongan pengaturan praktik akuntansi di sektor publik. Maka, rekomendasi konkret yang dapat dieksekusi sebagai langkah awal adalah penataan kembali akuntansi sektor publik. Salah satu hal yang amat substansi adalah konsensus terhadap ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Tuntutan reformasi yang membawa demokratisasi pengelolaan organisasi dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Otomatis, tuntutan tersebut lebih dikaitkan dengan bidang pengelolaan keuangan publik. Dalam lingkup Indonesia, desentralisasi pengelolaan pemerintahan di daerah serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas memaksa pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga berlaku pada organisasi sektor publik lainnya, yaitu organisasi publik nonpemerintah. Menjadi harapan bersama bahwa sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dari uraian diatas, harapan tersebut masih menjadi kendala yang perlu perhatian khusus di sisi kesejahteraan masyarakat

Hismendi (2013) Dampak merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memungkinkan berpengaruh negatif terhadap pasar modal, mengingat sebagian besar perusahaan yang go-public di BEI mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan publik tersebut banyak menggunakan bahan yang memiliki kandungan impor tinggi. Pemerintah mempunyai peran penting untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah, misalnya dengan menaikkan suku bunga SBI. Rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB tahun 2011 mencapai 48,9%. Total nilai transaksi saham tahunan dengan peningkatan sebanyak 4 persen dari Rp 1.176 triliun pada 2010 menjadi lebih dari Rp 1.223 triliun

pada 2011. Pencapaian positif indikator-indikator utama bursa didukung oleh kondisi fundamemiten-emiten yang tercatat di BEI. (BI, 2012).

Pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari, berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu. Indeks harga saham gabungan berubah setiap hari karena, (1) perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari, (2) adanya saham tambahan (masuknya emiten baru yang tercatat di Bursa Efek, atau terjadinya tindakan *corporate action* berupa stock split, right, waran, deviden saham, saham bonus, dan saham konversi).

Persaingan bisnis pada intinya disebabkan oleh kesalahan strategi yang mana kesalahan tersebut dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh peleku bisnis lainnya sebagai peluang yang mampu mencuri perhatian konsumen. Akan tetapi, diluar itu semua persaingan menjadi hal yang wajar dalam dunia bisnis dan pelaku bisnis pun sudah sadar penuh akan risiko tersebut. Kemanfaatan dari adanya persaingan mencakup : menghadirkan motivasi tinggi bagi pelaku bisnis, membantu untuk keluar dari zona nyaman (memutar startegi baru dan mencoba hal yang baru), membantu meningkatkan kinerja berbisnis, menciptakan konsumen yang loyal.

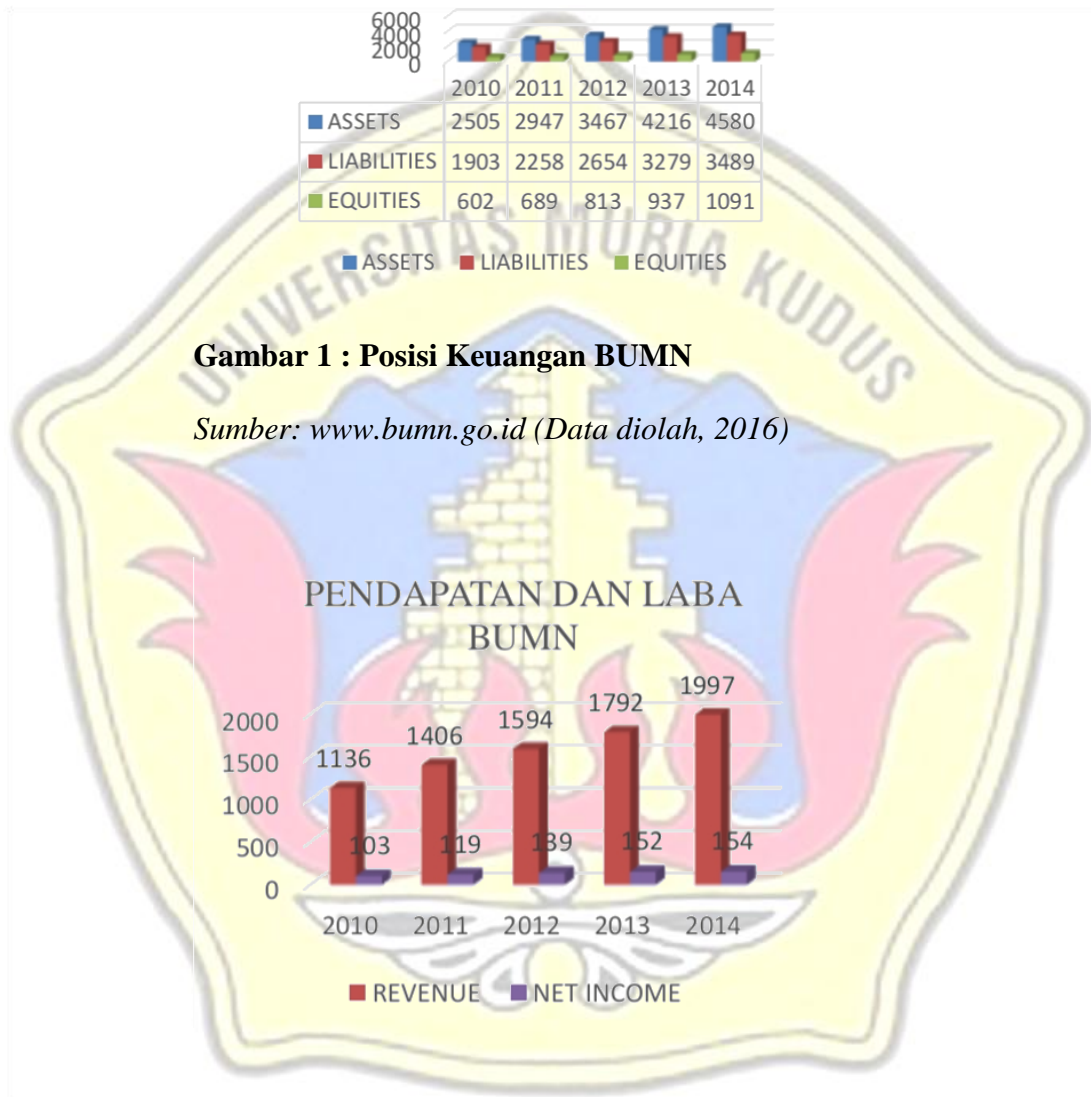
Salah satu ukuran nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cermin dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen asset. Korporasi atau perusahaan merupakan

salah satu faktor yang memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu Negara. Sebab, selain menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa, korporasi juga terlibat langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Peran ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya ekonomis yang sangat terbatas dan oleh karenanya harus dapat dialokasikan seoptimal mungkin.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah korporasi yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Oleh sebab itu, BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan serta konstruksi. BUMN dalam melaksanakan kegiatannya tercermin dalam salah satu alat ukur kinerja yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kinerja finansial BUMN dalam setiap tahunnya. Seperti yang dapat kita lihat di gambar 1 merupakan fenomena posisi keuangan BUMN mencerminkan tingkat modal BUMN yang bertumbuh secara tidak signifikan setiap tahunnya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan perhitungan total assets, liabilitas dan ekuitas BUMN sedangkan pada gambar 2 dan 3 menunjukkan tingkat pendapatan dan laba

BUMN yang tidak stabil sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan menghitung total dari *revenue*, *net income*, *return on assets* dan *net present value*.

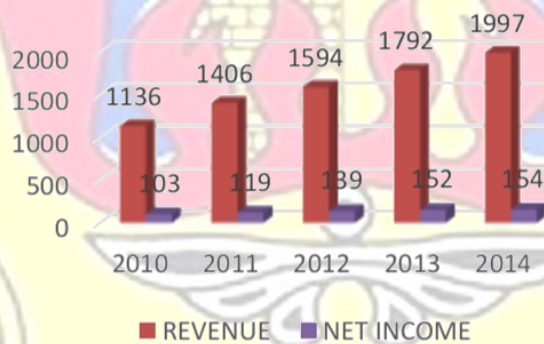
POSISI KEUANGAN BUMN



Gambar 1 : Posisi Keuangan BUMN

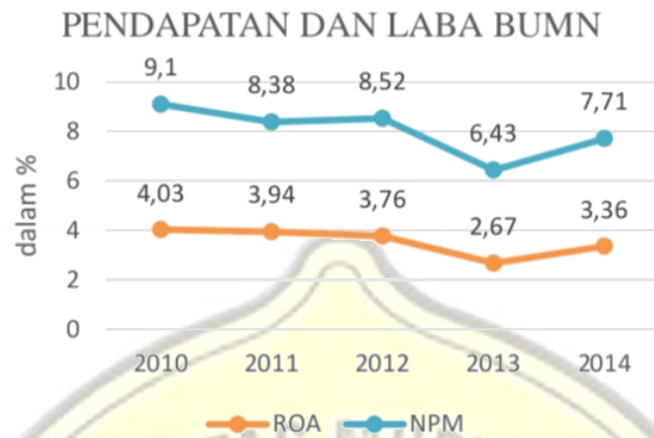
Sumber: www.bumn.go.id (Data diolah, 2016)

PENDAPATAN DAN LABA BUMN



Gambar 2 : Pendapatan dan Laba BUMN

Sumber: www.bumn.go.id (Data diolah, 2016)



Gambar 3 : Data ROA dan NPM

Sumber: www.bumn.go.id (Data diolah, 2016)

Meskipun secara umum kinerja finansial menunjukkan adanya peningkatan, namun dilihat dari sisi produktivitasnya kinerja BUMN belum mengalami perbaikan. Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN, antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara utuh di seluruh BUMN, belum optimalnya kinerja BUMN dikarenakan penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan, faktor lainnya adalah pendanaan melalui utang yang berlebihan atau *over leveraging*.

Terdapat *Research Gap* pada beberapa penelitian. Penelitian Liliana Marceline dan Anwar Harsono (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh

negative terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Gusti Ngurah Gede Rudangga *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Agus Santoso (2017) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Gusti Ngurah Gede Rudangga *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Gusti Bagus Angga Pratama dan Gusti Bagus Wiksuana (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Muhammad Umar Mai (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Muhammad Umar Mai (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Agus Santoso (2017) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran perusahaan, *leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN Publik. Peneliti tertarik mengambil judul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR BUMN PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018”

1.2. Ruang Lingkup

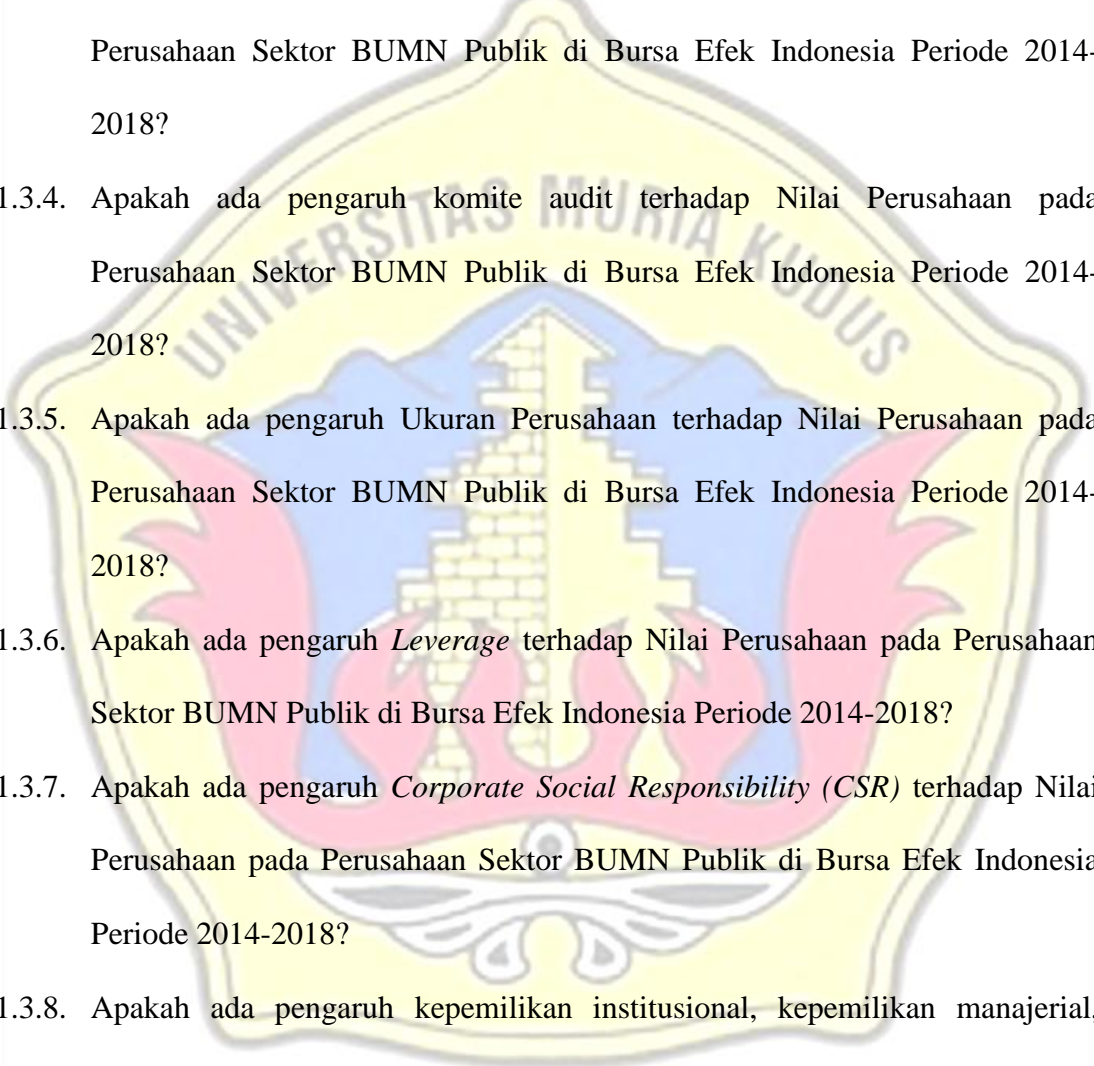
Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan, diantara lain sebagai berikut:

- 1.2.1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor BUMN publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018
- 1.2.2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan
- 1.2.3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governanace (GCG)* (dipecah menjadi empat dimensi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) Ukuran Perusahaan, *leverage* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?

- 
- 1.3.2. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
- 1.3.3. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
- 1.3.4. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
- 1.3.5. Apakah ada pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
- 1.3.6. Apakah ada pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
- 1.3.7. Apakah ada pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?
- 1.3.8. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit, Ukuran Perusahaan, *leverage* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini untuk :

- 1.4.1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- 1.4.2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- 1.4.3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- 1.4.4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- 1.4.5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- 1.4.6. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor BUMN Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

1.4.7. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor BUMN publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

1.4.8. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit, Ukuran Perusahaan, *leverage* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sektor BUMN publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki kegunaan yang dicapai guna memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan berdampak pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi, baik teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor nilai perusahaan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki kegunaan yang dicapai guna memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial.

b. Bagi Investor

Sebagai salah satu informasi yang dapat membantu investor ketika akan melakukan investasi di perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini merupakan aplikasi dari teori yang di dapat dari perkuliahan umum.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi penelitian terhadap mata kuliah manajemen keuangan khususnya dalam hal analisis Nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance (GCG)*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.